

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan partai politik di Indonesia dapat dilihat sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu sudah mulai berkembang kekuatan-kekuatan politik dalam tahap pengelompokan yang diikuti dengan polarisasi, ekspansi, dan pelembagaan. Partai politik di Indonesia lahir bersamaan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan yang menandai era kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menanamkan diri sebagai partai politik, namun memiliki program-program dan aktivitas politik.

Munculnya berbagai organisasi politik dapat dilihat dari hasil pendidikan modern saat diberlakukan kebijakan politik etis oleh pemerintahan colonial Belanda.¹ Akhir abad ke-19 pemerintahan kolonial Belanda merubah sebuah kebijakan politik etis yaitu politik balas budi pemerintah Belanda merubah sebuah kebijakan politik etis yaitu merupakan gagasan oleh Van Deventer untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang bertujuan ingin memperbaiki irigasi agar meningkatkan produksi pertanian, menganjurkan transmigrasi dari Pulau Jawa yang terlampau padat penduduknya dan memberikan pendidikan pada rakyat

¹Suradi, *Haji Agus Salim dan Konflik Sarekat Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997),p.1

pribumi.² Walaupun tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan administrasi dan birokrasi kolonial tingkat rendah, namun telah membangkitkan kesadaran kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan melalui gerakan politik.

Kehidupan partai politik di Indonesia sebelum kemerdekaan mulai menurun setelah tahun 1930. Hal itu terjadi karena kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Gubernur jenderal B.C.De Joungh 1931 menolak pemberi pengakuan pada organisasi pergerakan nasionalis. Kebijakan represif tersebut didukung oleh ketentuan pasal 35,36, 37 yang memberikan hak eksorbitan kepada gubernur jenderal yaitu wewenang mengasingkan orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban. Partai politik secara ketat juga diawasi politieke Inlichtingen Dients, Badan Intelejen Politik saat itu.³

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Negara masih saja mengalami berbagai hal : pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan dan agresi dari Belanda. Tekanan internal dan eksternal selama kurang lebih empat tahun membuat pemerintah Republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua aspek kehidupan masyarakat. Sampai kemudian tercapai perundingan KMB di Den Haag, Belanda pada 24 Agustus 1949. Draf akhir konferensi itu menyatakan bahwa Indonesia

²S. Nasution , *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), p.15

³Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konsitusioal di Indonesia: Studi sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1955),p.8-9

harus menanggung beban utang Hindia Belanda sebesar 6,5 milyar gulden, serta menambahkan kata serikat pada namanya menjadi Republika Indonesia Serikat (RIS). Negara hasil KMB ini yang memiliki banyak keterbatasan dan ketergantungan pada kerajaan Belanda, kemudian pada tanggal 16 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan perubahan RIS seraya menyatakan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang menetapkan bentuk pemerintahan berdasarkan Demokrasi parlementer. Sejak saat itu pemerintahan silih berganti, Perdana Menteri/kabinet datang dan pergi. Tidak kurang dari tujuh kali kabinet mengalami perubahan selama kurun waktu 1950-1959. Pergantian kabinet dalam jangka waktu pendek ini akibat dari kondisi perpolitikan yang tidak stabil.

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, partai-partai politik tetap berperan sebagai kekuatan politik yang amat berpengaruh. Parlemen yang pengisian anggotanya masih dilakukan melalui pengangkatan tidak lepas dari pengaruh partai politik. Kabinet-kabinet yang terbentuk tidak dapat menguasai mayoritas parlemen. Di sisi lain, kekuasaan Presiden dan angkatan bersenjata semakin berkurang.⁴ Pada saat itu muncul keinginan tokoh militer untuk berperan dalam politik. Hal itu disebabkan oleh semakin menurunnya kepercayaan militer terhadap partai politik dalam menjalankan roda pemerintahan.⁵

⁴Herbert Feith & Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta:LP3ES, 1998),P.41

⁵Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1988),P.30-31

Partai-partai yang berkembang pada awal kemerdekaan hingga pemilu 1955 pada umumnya dapat dilihat sebagai kelanjutan dari partai yang telah ada sebelum kemerdekaan. Partai-partai tersebut merupakan partai yang bersifat ideologis dengan fungsi dan program utama untuk mempertahankan kemerdekaan. Partai-partai tersebut menjalankan fungsi mengagregasikan dan mengartikulasikan aspirasi dan ideologi masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan serta rekrutmen politik yang memunculkan tokoh-tokoh nasional sebagai wakil rakyat maupun untuk mengisi jabatan pemerintahan.

Sebagai sebuah proses ada dua asumsi yang berbeda mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara tidak sengaja atau berjalan secara alamiah. Dalam hal ini, pendidikan bukanlah proses yang diorganisasikan secara teratur, terencana dan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaranya oleh suatu komunitas masyarakat (Negara) melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Pengertian ini merujuk pada fakta bahwa pada dasarnya manusia secara alamiah merupakan makhluk yang belajar dari peristiwa alam dan gejala-gejala kehidupan yang ada untuk mengembangkan kehidupannya. Kedua, pendidikan bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, direncanakan, didesain dan diorganisasi berdasarkan

aturan berlaku terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat.⁶

Pada masa peralihan antara tahun 1945-1950, bangsa Indonesia mengalami kesusahan diberbagai bidang mulai dari sosial, ekonomi, budaya, politik dan pendidikan . Penduduk Indonesia yang dapat membaca menulis huruf Latin sedikit sekali. Jumlahnya sekitar sepuluh persen saja. Selebihnya atau 90 persen buta huruf. Sejak dulu hingga 1950 an, wajib sekolah belum diberlakukan.

Rendahnya taraf pendidikan rakyat Indonesia ketika merdeka, maka salah satu upaya penting yang segera dilakukan pemerintah setelah merdeka adalah mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Usaha yang banyak dilakukan pada awal 1950 terutama mengurangi butu huruf. Maka dilakukan program meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis. Program ini dikenal dengan sebagai Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Kegiatan ini banyak dilakukan dalam bentuk kursus-kursus di pedesaan.⁷

Hasrat serta cita-cita nasional harus diproyeksikan dalam alam pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara serta mata pelajaran yang sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Mengingat bahwa masalah pendidikan ini merupakan faktor yang amat

⁶Fachul Mu'in, *Pendidikan Karakter Kontruksi Teoritik & Praktik "Urgensi Pendidikan Progresif dan Revitalisasi Peran Guru dan Orangtua"*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016),p.287

⁷Firman Lubis, *Jakarta 1950-1970*, (Jakarta: Masup Jakarta 2018),p.110

penting guna memajukan suatu bangsa, lebih-lebih untuk Indonesia yang baru bebas dari penjajahan maka dipandang perlu adanya suatu sistem pendidikan nasional yang berlaku secara menyeluruh di pelosok tanah air.

Sistem pendidikan nasional sebenarnya telah dirintis oleh para tokoh bangsa khususnya yang menangani bidang pendidikan, penjaharan dan kebudayaan, sejak sebelum kemerdekaan yaitu oleh seluruh panitia yang merupakan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Panitia yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara ini telah menghasilkan konsepsi pendidikan yang akan dipakai sebagai pedoman jika kemerdekaan telah dicapai. Pada tanggal 12 April 1946 Menteri PP dan K Mr. Suwandi membentuk Panitia Penyelidik dan Pengajaran Indonesia (PPPKI), yang bertugas meninjau usaha-usaha pendidikan dan pengajaran yang pada waktu itu telah berjalan dengan pedoman hasil panitia bagian PPKI. Selanjutnya pada tahun 1948 Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo membentuk Panitia Pembantu Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Panitia ini telah menghasilkan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan.⁸

Pada awal 1950 tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk menteri, 1 Maret 1946 yaitu warganegara sejati yang

⁸Suradi Hp dkk, *Sejarah Pemikiran pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1986),p. 49-50

menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila, seperti yang terumuskan dalam UUD 1945. Kemudian pada tahun 1950 tepatnya pada tanggal 5 April diundangkan undang undang Nomor 4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (S.Mangunsarkoro).⁹

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Biografi Ki Sarmidi Mangunsarkoro ?
2. Bagaimana Kondisi Politik di Indonesia Pada Tahun 1945-1950 ?
3. Bagaimana Peran Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam Politik Pada Tahun 1945-1950 ?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Riwayat Hidup dan Riwayat Pendidikan Ki Sarmidi Mangunsarkoro
2. Mengetahui Kondisi Politik di Indonesia Pada Tahun 1945-1950
3. Mengetahui Peran Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam Politik Pada Tahun 1945-1950

C. Kerangka Pemikiran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin

⁹Muhammad Rifa'I, *Sejarah Pendidikan Nasional : Dari Masa Klaiik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),p.142

tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya, peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁰

Pengertian peran menurut Soejono Soekanto (2002:243), merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi soaisalnya.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Mengapa politik penting dalam arti itu sangat penting ? karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 2002),p.242

merasa bahagia dan puas, ini adalah politik. Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (Negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber yang ada.

Dengan demikian sampai dengan kesimpulan bahwa politik dalam suatu Negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).¹¹

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian Sejarah adalah salah dari ilmu sejarah untuk menyusun kisah sejarah berdasarkan jejak masa lampau sumbernya.¹² Metode penelitian sejarah membantu sejarawan untuk menyusun kisah sejarah berdasarkan fakta-fakta yang ada, hal tersebut dilakukan agar sebuah penelitian menjadi ilmiah, kritis, objektif dan sistematis. Dengan menggunakan suatu metode penelitian kita dapat mengenal cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Menurut Kuntowijoyo, dalam melakukan penelitian sejarah memerlukan lima tahapan yaitu pemilihan topik,

¹¹Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),p.13-14

¹²Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1987),p.36

pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, interpretasi dan penulisan (historiografi).¹³

1. Pemilihan Topik

Tahapan awal melakukan penelitian maupun penulisan yaitu menentukan topik. Pemilihan topik menjadi penentu langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya agar peneliti fokus dalam pencarian sumber. Dalam pemilihan topik ada sebuah persyaratan yang menarik atau belum pernah diulas. Judul yang layak digunakan adalah judul penelitian yang menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah. Topik dipilih sebaiknya berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.¹⁴

2. Heuristik

Heuristik berasal dari Yunani *Heuriskein* yang berarti mencari atau menentukan jejak-jejak sejarah. Berdasarkan bahannya sumbersejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (artifact).¹⁵ sumber sejarah ialah nahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau.¹⁶

Sumber sejarah menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat berupa kesaksian langsung dari perilaku sejarah, sokumen, arsip, naskah

¹³Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2003),p.90

¹⁴Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*,p.91

¹⁵Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*,p.95

¹⁶Helius Syamsudin dan Ismaun, *Metode Sejarah*, (Jakarta, Depdikbud,1996),p.61

perjanjian dan benda. Sumber primer merupakan sumber yang sezaman dan berkaitan dengan peristiwa yang diteliti.

3. Verifikasi

Setelah pengumpulan sumber telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Verifikasi merupakan kegiatan meneliti sumber untuk menentukan validitas dan reabilitas sumber sejarah melalui kritik sumber. Kritik sumber dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal.¹⁷ Hal ini dilakukan karena tidak semua sumber yang didapatkan bisa digunakan, maksudnya tidak semua sumber itu benar atau asli, maka setiap sumber yang didapatkan harus diuji kebenarannya.

4. Interpretasi

Tahap keempat dalam penulisan sejarah adalah interpretasi. Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan terhadap sumber-sumber melalui proses yang terdiri dari analisis dan sintesis, kedua proses tersebut harus memikirkan unsur-unsur yang relevan pada dokumen. Analisis data dilakukan setelah beberapa data yang diperoleh telah melalui tahap uji kelayakan. Kemudian dilanjutkan pada proses sintesis dari data-data yang didapat digabungkan sehingga menghasilkan suatu pendapat yang saling berhubungan dan sesuai dengan fakta yang ada. Interpretasi sejarah lebih merupakan produk penilaian pribadi terhadap realita sejarah.¹⁸

¹⁷I Gde Widja, *Sejarah Lokal dalam Pengajaran Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989),p.18

¹⁸Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012),p.87

5. Historiografi

Tahap terakhir dalam penulisan sejarah adalah historiografi. Penelitian secara umum historiografi atau penulisan sejarah dapat diartikan sebagai penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah. Sehingga hasil penelitiannya diwujudkan dalam bentuk tulisan serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah dalam kacamata penelitian historis. Historiografi merupakan puncak dari metode penelitian sejarah.¹⁹

E. Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman ide dari penelitian, penulis menerapkan sistematika pembahasan yang termuat ke dalam lima bab :

Bab I Pendahuluan meliputi : Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Biografi Ki Sarmidi Mangunsarkoro meliputi : Riwayat Hidup Ki Sarmidi Mangunsarkoro, Riwayat Pendidikan Ki Sarmidi Mangunsarkoro, Pengalaman dalam Pendidikan dan Organisasi.

Bab III Kondisi Politik di Indonesia 1945-1950 meliputi : Kondisi Politik di Indonesia tahun 1945-1950, Kondisi Pendidikan di Indonesia tahun 1945-1950, Gagasan Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam Politik dan Pendidikan.

¹⁹Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*,...p.51

Bab IV membahas lebih dalam mengenai Peran Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam Politik 1945-1950 : Peran dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Peran Dalam Partai Nasional Indonesia (PNI), Menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Bab V adapun mengenai pada bab terakhir ini adalah penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.